



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 55);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 55) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 80

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 80 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD Perubahan Kabupaten Garut tahun 2023 dengan tema “**Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**”, untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang

berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan

- target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
  3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023; dan/atau
  4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah tahun 2023 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui perkara.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Garut selanjutnya menjadi dasar

perumusan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan

perubahan Renja Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Tahun 2023.

## 2. Tujuan

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang di selaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Tujuan, Sasaran dan Target Tahun berjalan
- 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

### 2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

<b>URUSAN DAN PROGRAM</b>	<b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>24.942.757.355</b>	<b>97,64</b>	<b>24.354.047.829</b>
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>24.942.757.355</b>	<b>97,64</b>	<b>24.354.047.829</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.023.781.355	48,09	3.377.472.345
Program Penataan Desa	2.595.000.000	24,86	645.017.300
Program Peningkatan Kerjasama Desa	400.000.000	9,67	38.683.387
Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.357.276.000	186,39	17.441.013.247
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.566.700.000	51,23	2.851.861.550
<b>JUMLAH</b>	<b>24.942.757.355</b>	<b>97,64</b>	<b>24.354.047.829</b>

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp.24.942.757.355,00, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.354.047.829,00 atau sebesar 97,64%.

### 2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 40,56% untuk target kinerja dan 37,67% untuk target anggaran.

**Tabel 2.2**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran**  
**Program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

URUSAN DAN PROGRAM	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	40,56	37,67
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40,56	37,67
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,06	38,11
Program Penataan Desa	32,74	30,19

URUSAN DAN PROGRAM 1	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	2	3
Program Peningkatan Kerjasama Desa	50,00	14,08
Program Administrasi Pemerintahan Desa	60,00	70,77
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	20,00	35,19
<b>JUMLAH</b>	<b>40,56</b>	<b>37,67</b>

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Nama Urusan dan Program 1	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) 2	% Realisasi thd Renja 3	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) 4
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	40.146.805.327	60,66	24.354.047.829
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.146.805.327	60,66	24.354.047.829

<b>Nama Urusan dan Program</b>	<b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b>	<b>% Realisasi thd Renja</b>	<b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.969.248.827	48,46	3.377.472.345
Program Penataan Desa	2.307.500.000	27,95	645.017.300
Program Peningkatan Kerjasama Desa	160.000.000	24,18	38.683.387
Program Administrasi Pemerintahan Desa	25.712.926.000	67,83	17.441.013.247
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.997.130.500	57,07	2.851.861.550
<b>JUMLAH</b>	<b>40.146.805.327</b>	<b>60,66</b>	<b>24.354.047.829</b>

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

### **2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA**

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 37,43% untuk target kinerja, dan 38,35% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran**  
**Program Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>37,43</b>	<b>38,35</b>
<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>37,43</b>	<b>38,35</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,06	42,33
Program Penataan Desa	32,74	19,51
Program Peningkatan Kerjasama Desa	50,00	29,96
Program Administrasi Pemerintahan Desa	28,57	33,67
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	20,00	42,36
<b>JUMLAH</b>	<b>37,43</b>	<b>38,35</b>

*Sumber : PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023*

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,019	84,013	84,013	84,429	100,50	84,013	253,45	294,64		
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	500	100	100	100	100	300	60,00		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	7	7	7	100	5	19	54,29
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2				1	1	50,00	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2						1	1				1	50,00
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2						1	1				1	50,00
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2						1	1				1	50,00
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100	4	12	60,00					
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	5	5	5	100	5	15	60,00					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>60,00</b>					
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245	49	49	49	100	49	147	60,00					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3	40,00					
2	13	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>	500	100	100	100	100	100	300	60,00					
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60,00					
2	13	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparat DPMD</b>	500	100	100	100	100	100	300	60,00					
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	3	3	3	100		6	50,00					
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225	75	78	78	100		153	68,00					
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	500	100	100	100	100	100	300,0	60,00					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	4	4	4	100	4	12,0	60,00					
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6,0	60,00					
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6,0	60,00					
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	36,0	60,00					
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100	12	36,0	60,00					
2	13	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300,0</b>	<b>60,00</b>					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan											
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	13	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8							3	3,0	37,50				
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	2	2	6,0	60,00				
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	3	3	3	100	4	3	4	10,0	125,00				
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300,0</b>	<b>60,00</b>				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	12	12	36,0	60,00				
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	1	1	3,0	60,00				
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	12	12	36,0	60,00				
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300,0</b>	<b>60,00</b>				

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	133	29	29	29	100	21%	58,2	43,77					
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>50,0</b>	<b>90,91</b>					
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300,0</b>	<b>60,00</b>					
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	130	26	26	26	100	32	84,0	64,62					
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1094	220	220	220	100	261	701,0	64,08					
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	20	4	4	4	100	4	12,0	60,00					
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>9,44</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>100</b>	<b>2,78</b>	<b>6,1</b>	<b>64,62</b>					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	186,35	37,05	37,05	37,05	100	38,16	112,3	60,24					
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	1	1	5	500	1	7,0	140,00					
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	300	60	60	60	100	80	200,0	66,67					
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	500	100	100	100	100	100	300,0	60,00					
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5	1	1	1	100		2,0	40,00					
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5	1	1	1	100		2,0	40,00					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	5	1					1,0	20,00
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	23155	4631	4631	4631	100	4771	14033,0	60,60
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00
2	13	04	2.01	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00
2	13	04	2.01	013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00
2	13	04	2.01	015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00
2	13	04	2.01	018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2					3				
					4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKATHUKUM ADAT</b>	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	500	100	100	100	100	300,0	60,00	
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	44,03	8,26	8,26	8,26	100	11,01	27,5	62,53
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	6	6	6	100	6	18,0	60,00

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan										
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1					2					3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5	1	1	1	100	1	3,0	60,00					

SUMBER : PERUBAHAN RENSTRA DPMD TAHUN 2029-2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 5 (enam) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2023 pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 3 (tiga) Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Realisasi 48,46%)
- 2) Program Penataan Desa (Realisasi 27,95%).
- 3) Program Peningkatan Kerjasama (Realisasi 24,18%).

Dari 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Pada Tahun 2023 pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 7 (tujuh) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Realisasi 48,31%).
- 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Realisasi 24,61%).
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Realisasi 48,08%).

- 4) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Realisasi 45,73%).
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Realisasi 11,73%).
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa (Realisasi 27,95%)
- 7) Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa (Realisasi 24,18%)
- 8) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (40,12%).

Dari 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokuman Perubahan RKA-SKPD (Realisasi 0%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Realisasi 0%).
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Realisasi 48,27%).
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah (Realisasi 24,61%).
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Realisasi 49,25%).

- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Realisasi 49,99%)
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Realisasi 49,71%)
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu (Realisasi 41,67%).
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Realisasi 45,69%).
- 10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Realisasi 0%).
- 11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Realisasi 29,56%).
- 12) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Realisasi 47,50%).
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Realisasi 47,53%).
- 14) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Realisasi 47,53%).
- 15) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa (Realisasi 13,05%).
- 16) Fasilitasi Tata Wilayah Desa (Realisasi 45,48%).
- 17) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (Realisasi 0%).
- 18) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Realisasi 6,30%).
- 19) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Realisasi 45,96%).

20) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (Realisasi 1,92%).

21) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (Realisasi 0%).

22) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (Realisasi 43,72%).

23) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Realisasi 2,76%).

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.969.248.827</b>	<b>3.377.472.345</b>	<b>48,46</b>
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	0	0
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	0	0
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.125.197.697</b>	<b>2.475.752.160</b>	<b>48,31</b>
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.100.197.697	2.461.992.160	48,27
<b>2.13.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>148.500.000</b>	<b>36.543.975</b>	<b>24,61</b>
2.13.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.500.000	36.543.975	24,61
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>173.828.930</b>	<b>83.577.900</b>	<b>48,08</b>
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000	19.205.800	49,25

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	4.999.200	49,99
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.638.930	5.288.400	49,71
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.190.000	5.912.500	41,67
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	36.548.000	45,69
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.322.200	0	0
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500.400.000</b>	<b>228.839.350</b>	<b>45,73</b>
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	14.780.750	29,56
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	4.749.800	47,50
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.400.000	209.308.800	47,53
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000	7.992.000	3,55
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>2.307.500.000</b>	<b>645.017.300</b>	<b>27,95</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>2.307.500.000</b>	<b>645.017.300</b>	<b>27,95</b>
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	113.078.000	14.760.000	13,05
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	1.385.752.000	630.257.300	45,48
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	808.670.000	0	0
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>160.000.000</b>	<b>38.683.387</b>	<b>24,18</b>
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>160.000.000</b>	<b>38.683.387</b>	<b>24,18</b>
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	120.000.000	7.560.000	6,30
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4.390.000.000	84.201.850	1,92
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	130.000.000	0	0
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	107.500.000	46.999.900	43,72

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kelurahan			
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	520.000.000	14.359.900	2,76

SUMBER: LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2023

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari 5 (lima) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 2 (dua) Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Administrasi Pemerintahan Desa (Realisasi 67,83%).
- 2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Realisasi 57,07%).

Dari 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 4 (empat) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Realisasi 61,28%)
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Realisasi 70,86%)
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Realisasi 67,83%).
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelaku Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten Kota (Realisasi 57,07%).

Dari 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ada 19 (sembilan belas) yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Realisasi 63,77%).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Realisasi 100%).
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Realisasi 100%).
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Realisasi 86,80%).

- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Realisasi 52,90%)
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (55,04%).
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Realisasi 57,30%)
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Realisasi 58,94%)
- 9) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Realisasi 79,36%)
- 10) Pengadaan Mebel (Realisasi 67,10%)
- 11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Realisasi 64,30%)
- 12) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Realisasi 77,81%)
- 13) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Realisasi 88,41%)
- 14) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Realisasi 97,63%).
- 15) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Realisasi 92,70%).
- 16) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Realisasi 56,18%).
- 17) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Realisasi 69,75%).

18) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Realisasi 66,82%)

19) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Realisasi 58,62%)

Untuk lebih jelasnya Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>2.13.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>180.000.000</b>	<b>110.310.760</b>	<b>61,28</b>
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	22.319.000	63,77
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	30.379.000	86,80
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	47.612.760	52,90
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	13.760.000	55,04

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	5.729.900	57,30
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	5.894.100	58,94
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>581.322.200</b>	<b>411.950.000</b>	<b>70,86</b>
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	277.750.000	79,36
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000	134.200.000	67,10
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	22.506.200	64,30
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>			
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>			
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	40.000.000	31.123.387	77,81
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>25.712.926.000</b>	<b>17.441.013.247</b>	<b>67,83</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>25.712.926.000</b>	<b>17.441.013.247</b>	<b>67,83</b>
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	100.000.000	88.405.946	88,41
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	900.000.000	878.662.111	97,63
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.216.650.000	14.105.114.125	92,70
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>4.997.130.500</b>	<b>2.851.861.550</b>	<b>57,07</b>
<b>2.13.05.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.997.130.500</b>	<b>2.851.861.550</b>	<b>57,07</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	920.000.000	516.878.000	56,18
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	462.130.500	322.342.800	69,75
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.245.000.000	1.500.000.000	66,82
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	850.000.000	498.280.850	58,62

SUMBER: LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2023

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut karena Program, Kegiatan dan Sub kegiatan masih berlangsung pada triwulan selanjutnya.

b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Pada Tahun 2023 (Triwulan II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Sub Koordinator dan Kasubbag yang menangani kegiatan/sub kegiatan.
- 2) Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait scedule dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan .

Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :









2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	133	155.596.000	29	22.321.000	21	35.000.000	4	10.482.300	4	12.023.900	8	22.506.200	38,10	64,30	44.827.200	-	28,81	DPMD							
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1.140.000.000	1	130.000.000	1	225.000.000			1	7.992.000		7.992.000	100,00	3,55	137.992.000	-	12,10	DPMD							
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	69,05	33,93										
																				Predikat Kinerja	sangat rendah											
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Memiliki Penataan Desa Berkualitas</b>	%	55	8.895.000.000	15	2.040.000.000	20	2.307.500.000		68.877.800		576.139.500		645.017.300			2.685.017.300		30,19	DPMD							
2	13	02	2,01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang telah Menyelenggarakan Penataan Desa	%	500	8.895.000.000	100	2.040.000.000	100	2.307.500.000		68.877.800		576.139.500		645.017.300			2.685.017.300		30,19	DPMD							
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	130	1.100.000.000	26	250.000.000	32	113.078.000	23	14.020.000	5	740.000		28	14.760.000	87,50	13,05	264.760.000	-	24,07	DPMD						
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	1094	1.245.000.000	220	290.000.000	261	1.385.752.000	10	54.857.800	18	575.399.500		28	630.257.300	10,73	45,48	920.257.300	-	73,92	DPMD						
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi	Desa	20	6.550.000.000	4	1.500.000.000	4	808.670.000						-	-	-	-	1.500.000.000	-	22,90	DPMD						
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	32,74	19,51										
																				Predikat Kinerja	sangat rendah											
3	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa yang Terjalin</b>	3,90%	9,44	2.050.000.000	1,66	250.000.000	2,78	160.000.000		25.463.387		13.220.000		38.683.387			288.683.387		14,08	DPMD							
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi Kerjasamanya	39,82%	186,36	2.050.000.000	37,05	250.000.000	38,16	160.000.000		25.463.387		13.220.000		38.683.387			288.683.387		14,08	DPMD							
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.400.000.000	1	100.000.000	1	40.000.000		23.223.387	1	7.900.000		1	31.123.387	100,00	58,06	131.123.387		9,37	DPMD						

2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	650.000.000	1	150.000.000	1	120.000.000	2.240.000	5.320.000	-	7.560.000	-	1,87	157.560.000	24,24	DPMD								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	29,96								
																			Predikat Kinerja		sangat rendah									
4	2	13	04		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Tata Kelola yang Akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>36.576.584.378</b>	<b>60</b>	<b>8.445.334.878</b>	<b>80</b>	<b>25.712.926.000</b>	<b>15.750.403.220</b>	<b>1.690.610.027</b>	<b>17.441.013.247</b>	<b>25.886.348.125</b>	<b>70,77</b>	<b>DPMD</b>											
2	13	04	2,01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>36.576.584.378</b>	<b>100</b>	<b>8.445.334.878</b>	<b>100</b>	<b>25.712.926.000</b>	<b>15.750.403.220</b>	<b>1.690.610.027</b>	<b>17.441.013.247</b>	<b>25.886.348.125</b>	<b>70,77</b>	<b>DPMD</b>											
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	5	685.000.000	1	175.000.000					-	-	-	175.000.000	-	25,55	DPMD								
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	1.280.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	88.405.946			-	88.405.946	-	88,41	338.405.946	-	26,44	DPMD						
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	5	1.128.400.000	1	194.200.000					-	-	-	194.200.000	-	17,21	DPMD								
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	5	510.000.000	1	50.000.000					-	-	-	50.000.000	-	9,80	DPMD								
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	23155	25.485.184.378	4631	5.556.866.378	4771	4.868.776.000	4771	1.117.692.987	4771	1.119.936.328	9.542	2.237.629.315	200,00	45,96	7.794.495.693	-	30,58	DPMD					
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dokumen	5	1.675.000.000	1	350.000.000	1	4.390.000.000	84.201.850			-	84.201.850	-	1,92	434.201.850	-	25,92	DPMD						
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	4	1.650.000.000	1	1.053.530.500	1	900.000.000	320.108.412	558.553.699			-	878.662.111	-	97,63	1.932.192.611	-	117,10	DPMD					
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	5	1.180.000.000	1	361.308.000	1	130.000.000				-	-	-	361.308.000	-	30,62	DPMD							
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	5	1.188.000.000	1	159.430.000	1	15.216.650.000	14.105.114.125			-	14.105.114.125	-	92,70	14.264.544.125	-	1.200,72	DPMD						



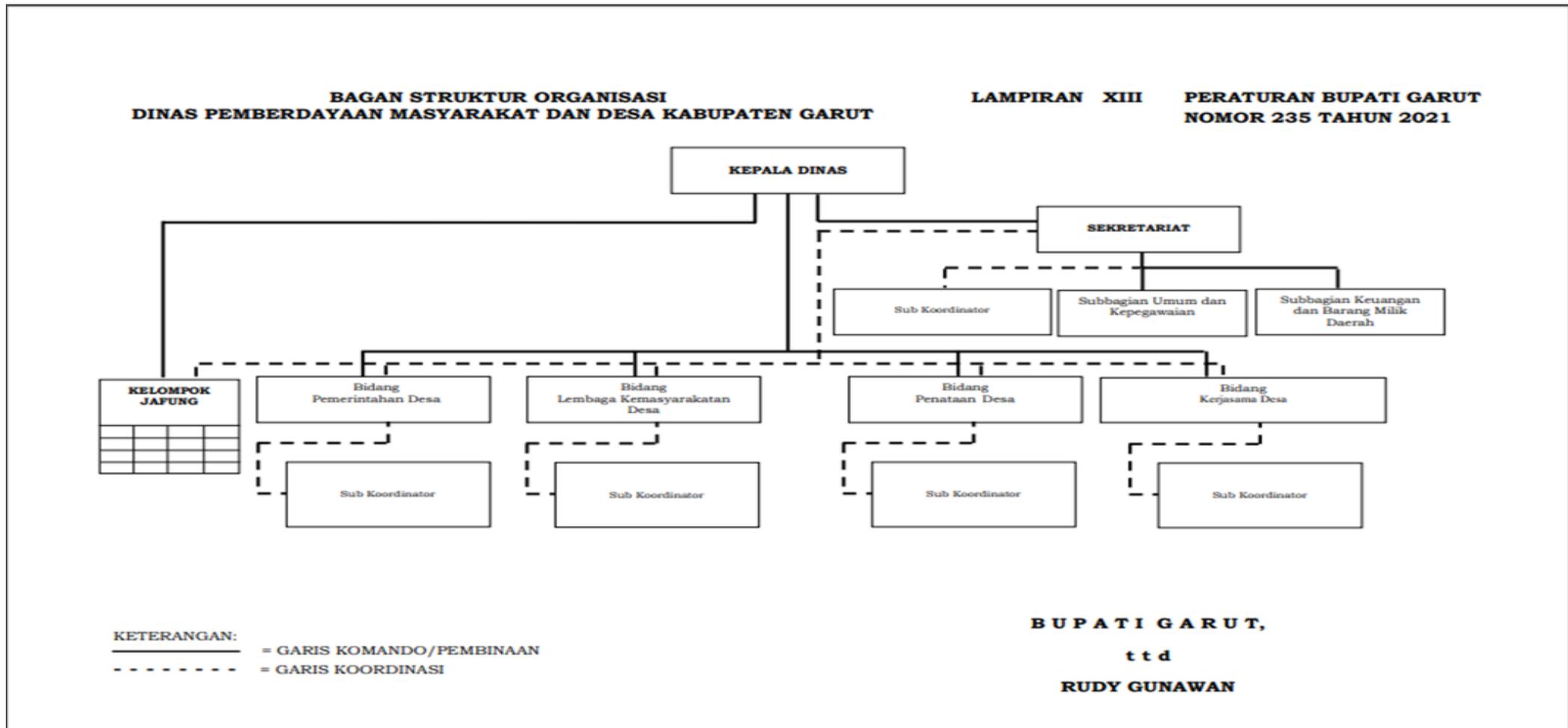


### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemberdayaan masyarakat dan desa semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 255 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



Tugas Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 255 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **3. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Organisasi**

DPMD Kabupaten Garut sebagai institusi yang harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin pencapaian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berdayaguna dan berhasil guna.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  1. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD.
  2. Sub Koordinator Koordinator Pembinaan , Pengawasan dan Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
  3. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahi :
  1. Sub Koordinator Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa.
  2. Sub Koordinator Partisipasi Masyarakat Desa.
  3. Sub Koordinator Ketahanan Masyarakat Desa.

- e. Bidang Kerjasama Desa , membawahi :
  - 1. Sub Koordinator Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota.
  - 2. Sub Koordinator Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota.
  - 3. Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- f. Bidang Penataan Desa, membawahi :
  - 1. Sub Koordinator Penataan Kewenangan Desa.
  - 2. Sub Koordinator Tata Wilayah Desa.
  - 3. Sub Koordinator Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang			94,77%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,070	84,013	85,006	86,019	82,954	84,429	85,006	86,019	

SUMBER: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DPMD TAHUN 2019-2024

## **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 421 Desa di Kabupaten Garut berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** pada tahun 2022 tersebut terpetakan sebagai berikut :

1. Desa Mandiri : 70 Desa
2. Desa Maju : 155 Desa
3. Desa Berkembang : 196 Desa

Melihat kondisi di atas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Perkembangan yang cukup signifikan bahwa sejak tahun 2021 di Kabupaten Garut sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

#### Dampak

- Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

- Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).

- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
- Kualitas SDM belum optimal.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa.
- Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kabupaten Garut yang berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

- Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
- Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
- Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

## **2.5 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 5 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penataan Desa;
  - c. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
  - d. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
  - e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 42 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 40.028.403.644,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu

indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 40.028.403.64,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 39.786.929.774,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp. 241.473.900,00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 40.028.403.64,00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 40.028.403.64,00.

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.10**  
**Riview Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rancangan Perubahan RKPD				Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif(Rp.)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,006	6.820.847.144	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,006	6.820.847.144	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	90.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	90.000.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.976.796.014</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4.976.796.014</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.951.796.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.951.796.014	

1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>148.500.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>148.500.000</b>	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	148.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	148.500.000	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>183.628.930</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>183.628.930</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.000.000	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.800.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.638.930	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.638.930	
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.190.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.190.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000	
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>581.322.200</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>581.322.200</b>	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	350.000.000	
15.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	200.000.000	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.322.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31.322.200	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>490.600.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>490.600.000</b>	

1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.600.000
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	35.000.000
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>15%</b>	<b>2.307.500.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>15%</b>	<b>2.307.500.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>2.307.500.000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>2.307.500.000</b>
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32 Desa	113.078.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32 Desa	113.078.000
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	261 Desa	1.385.752.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	261 Desa	1.385.752.000
2.1.3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	808.670.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	808.670.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>2,78%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>2,78%</b>	<b>160.000.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>38,16%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>38,16%</b>	<b>160.000.000</b>
3.1.1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000
3.1.2	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	120.000.000	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	120.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>80%</b>	<b>25.512.926.000</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>80%</b>	<b>25.512.926.000</b>

4.1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>25.512.926.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>25.512.926.000</b>
4.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	100.000.000
4.1.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	4771 Orang	4.868.776.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	4771 Orang	4.868.776.000
4.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	4.190.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	4.190.000.000
4.1.4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	900.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	900.000.000
4.1.5	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	130.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	130.000.000
4.1.6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	15.216.650.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	15.216.650.000
4.1.7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	107.500.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	107.500.000
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>5.227.130.500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>5.227.130.500</b>
5.1	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan</b>	<b>11%</b>	<b>5.227.130.500</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan</b>	<b>11%</b>	<b>5.227.130.500</b>
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	920.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	920.000.000
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	412.130.500	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	412.130.500
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	2.525.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	2.525.000.000
5.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	520.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	520.000.000

5.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	850.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	850.000.000	
					<b>40.028.403.644</b>						<b>40.028.403.644</b>

SUMBER : SIPD RANCANGAN RKPd PERUBAHAN TAHUN 2023



2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Laporan	1Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	25.000.000
2	13	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>											<b>148.500.000</b>	<b>148.500.000</b>				<b>150.000.000</b>
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	148.500.000	148.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	150.000.000
2	13	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>0</b>	<b>0</b>				<b>274.000.000</b>
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	3 Paket	3 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	74.000.000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	75 Orang	75 Orang	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	200.000.000
2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>193.628.930</b>	<b>193.628.930</b>				<b>741.500.000</b>
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Paket	1Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	25.000.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	4 Paket	4 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	39.000.000	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	160.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	2 Paket	2 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	9.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	60.000.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	2 Dokumen	2 Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	10.638.930	10.638.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	14.190.000	14.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	150.000.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	100.000.000	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	321500.000
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	10.000.000
2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>561.322.200</b>	<b>561.322.200</b>				<b>4.100.000.000</b>
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Unit	3 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	350.000.000	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	68 Unit	68 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	4 Unit	4 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	3.132.200	3.132.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	10.000.000
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Unit	1Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	4.000.000.000
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	10 Unit	10 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	10.000.000
2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>500.400.000</b>	<b>490.600.000</b>				<b>235.000.000</b>

2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	75.000.000		
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1 Laporan	1 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	10.000.000		
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	440.400.000	430.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	50.000.000		
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>				<b>390.000.000</b>
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	21 Unit	21 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000		
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1 Unit	1 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	350.000.000		
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>													<b>2.382.500.000</b>	<b>2.307.500.000</b>				<b>3.900.000.000</b>
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>													<b>2.382.500.000</b>	<b>2.307.500.000</b>				<b>3.900.000.000</b>
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	32 Desa	32 Desa	100 %	100 %	50.000.000	13.078.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	250.000.000		
2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Wilayahnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	261 Desa	261 Desa	100 %	100 %	1.417.500.000	1.385.752.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	3.000.000.000		
2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Kewenangannya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	250 Desa	250 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000		
2	13	02	2.01	04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	421 Desa	421 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000		
2	13	02	2.01	05	Fasilitas Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	50.000.000		
2	13	02	2.01	06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	815.000.000	808.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000		
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>													<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>				<b>750.000.000</b>
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>													<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>				<b>750.000.000</b>
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	2,78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	350.000.000		
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	2,78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	400.000.000		
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>													<b>25.902.276.000</b>	<b>25.512.926.000</b>				<b>10.212.276.000</b>
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>													<b>25.902.276.000</b>	<b>25.512.926.000</b>				<b>10.212.276.000</b>
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000		
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	365.000.000		

2	13	04	2.01	03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	370.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	4771 Orang	4771 Orang	100 %	100 %	4.898.776.000	4.898.776.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	6.642.276.000
2	13	04	2.01	06	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4.390.000.000	4.190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	1.000.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	900.000.000	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	0
2	13	04	2.01	11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Profil Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	150.000.000	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	265.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.356.000.000	5.276.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	450.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	15 Desa	15 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	107.500.000	107.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>											<b>4.170.000.000</b>	<b>5.227.130.500</b>			<b>7.671.700.000</b>	
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>4.170.000.000</b>	<b>5.227.130.500</b>			<b>7.671.700.000</b>	
2	13	05	2.01	02	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	500.000.000	920.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	2.300.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	100 %	525.000.000	412.130.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	2.195.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.245.000.000	2.525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	950.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	651.700.000

2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1Laporan	1Laporan	100 %	100 %	0	520.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya	100 %	330.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	900.000.000	850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	1.285.000.000

SUMBER : SIPD RANCANGAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan

sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya

yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut tahun 2019-2024.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut.
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah:"Garut yang Bertaqwa,

Maju dan Sejahtera" Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa :Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3. Sejahtera:Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat,cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah.
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat.
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah.
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian.
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa.

- c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman.
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi local.
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan

dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 2 Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi dan PPD 4 Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 235 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, melaksanakan fungsi penunjang pemberdayaan masyarakat dan desa. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 157 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa, dengan indikator:
  - a. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 pada table 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	100%

*SUMBER : PERUBAHAN RENSTRA DPMD TAHUN 2019-2024*

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya, dengan indikator:
  - a. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang.
2. Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD, dengan indikator :
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 pada table 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	100%
2.	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,006 Poin

*SUMBER : PERUBAHAN RENSTRA DPMD TAHUN 2019-2024*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	42	40.028.403.644,00
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>40.028.403.644,00</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023*

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
2. Jumlah program sebanyak 5 program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penataan Desa;
  - c. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
  - d. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
  - e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan,
  4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 42 sub kegiatan
  5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp.40.028.403.644,00, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 51.688.547.355,00 mengalami penyesuaian sebesar Rp.11.901.617.581,00 pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp.39.786.929.774,00, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.241.473.900,00 menjadi sebesar Rp. 40.028.403.644,00, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table 3.4 dan 3.5 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPd 2023	Pagu Indikatif				RKPd 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPd 2023										
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2	13	01				85.006 Poin	85.006 Poin	13,594,505,355	7,172,153,774	6,820,847,144						85.006 Poin	11,263,281,355			
2	13	01	2.01			100 %	100 %	195,000,000	180,000,000	180,000,000						100 %	220,000,000			
2	13	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu														
2	13	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	5 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	4 Laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	105,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	5 Laporan	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	5,152,781,355	5,308,102,644	4,976,796,014						100 %	5,152,781,355		

2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			49 Orang /bulan	49 Orang /bulan	5,127,781,355	5,283,102,644	4,951,796,014	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN DPMD Kabupaten Garut	49 Orang/bul	an 5,127,781,355	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN DPMD Kabupaten Garut	1 Laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah			100 %	100 %	150,000,000	148,500,000	148,500,000						100 %	150,000,000		
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	148,500,000	148,500,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD			100 %	100 %	272,000,000	0	0							100 %	274,000,000	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3 Paket	3 Paket	72,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Pegawai DPMD Kabupaten Garut	3 Paket	74,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			75 Orang	75 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Pegawai DPMD Kabupaten Garut	75 Orang	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik			100 %	100 %	721,500,000	193,628,930	183,628,930							100 %	741,500,000	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Paket	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	150,000,000	39,000,000	39,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	4 Paket	160,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	55,000,000	10,000,000	19,800,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	2 Paket	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	10,638,930	10,638,930	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	14,190,000	14,190,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	321,500,000	100,000,000	80,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	12 Laporan	321,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

2	13	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>				100 %	100 %	6,268,224,000	581,322,200	581,322,200			100 %	4,100,000,000				
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	3 Unit	1,190,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	3 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			68 Unit	68 Unit	788,224,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	68 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	250,000,000	31,322,200	31,322,200	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	4 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	4,000,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	10 Unit	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>				100 %	100 %	400,000,000	500,400,000	490,600,000						100 %	235,000,000	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	12 Laporan	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	225,000,000	440,400,000	430,600,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>				100 %	100 %	435,000,000	260,000,000	260,000,000						100 %	390,000,000	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			21 Unit	21 Unit	100,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	21 Unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	335,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	DPMD Kabupaten Garut	1 Unit	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>				15 %	15 %	4,900,000,000	2,382,500,000	2,307,500,000						15 %	3,900,000,000	

2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	100 %	100 %	4,900,000,000	2,382,500,000	2,307,500,000					100 %	3,900,000,000			
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32 Desa	32 Desa	1250,000,000	150,000,000	153,078,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	32 Desa	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	02	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	261 Desa	261 Desa	3,000,000,000	1,417,500,000	1,385,752,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	261 Desa	3,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	03	Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	250 Desa	250 Desa	200,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	250 Desa	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	04	Facilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	421 Desa	421 Desa	200,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	421 Desa	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	05	Facilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	06	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	4 Unit	200,000,000	815,000,000	808,670,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	4 Unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2.78 %	2.78 %	750,000,000	160,000,000	160,000,000						2.78 %	750,000,000	
2	13	03	2.01		Facilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	38.16 %	38.16 %	750,000,000	160,000,000	160,000,000						38.16 %	750,000,000	
2	13	03	2.01	02	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Desa	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	80 %	24,119,042,000	25,902,276,000	25,512,926,000						80 %	10,212,276,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	24,119,042,000	25,902,276,000	25,512,926,000						100 %	10,212,276,000	

2	13	04	2.01	01	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	02	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	365,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	365,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	03	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	370,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	370,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				4771 Orang	4771 Orang	9,983,190,000	4,898,776,000	4,868,776,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	4771 Orang	6,642,276,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000,000	4,390,000,000	4,190,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	1,120,852,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	260,000,000	150,000,000	130,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenraman dan Keterbacaan serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	265,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2	13	04	2.01	13	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				1Dokumen	1Dokumen	150,000,000	5,356,000,000	5,216,650,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1Dokumen	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	15	Facilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				15 Desa	15 Desa	250,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	15 Desa	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1Dokumen	1Dokumen	420,000,000	107,500,000	107,500,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Aparatur Pemerintahan Desa	1Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase desa yang Lembaganya diberdayakan</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>8,325,000,000</b>	<b>4,170,000,000</b>	<b>5,227,130,500</b>						<b>100 %</b>	<b>7,671,700,000</b>	
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Melakukannya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga masyarakat desa yang telah diberdayakan</b>				<b>11.01 %</b>	<b>11.01 %</b>	<b>8,325,000,000</b>	<b>4,170,000,000</b>	<b>5,227,130,500</b>						<b>11.01 %</b>	<b>7,671,700,000</b>	
2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1Dokumen	1Dokumen	2,300,000,000	500,000,000	920,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Lembaga masyarakat	1Dokumen	2,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	2,155,000,000	525,000,000	412,130,500	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Lembaga masyarakat	6 Lembaga	2,155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Tabel 3.5**  
**Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan															
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum				Sesudah						
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																			
2	13	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																			
2	13	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	5 Dokumen	5 Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin		35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin		5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin		5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin		5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin		5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	4 Laporan	4 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin		35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	35.000.000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	5 Laporan	5 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin		90.000.000	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	925.000.000
2	13	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	49 Orang.bul an	49 Orang.bul an	85.006 Poin	85.006 Poin		5.283.102.644	4.951.796.014	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.127.781.355

2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Laporan	1Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																	<b>148.500.000</b>	<b>148.500.000</b>						<b>15</b>
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	148.500.000	148.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
<b>Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah</b>																	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>27</b>
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Alinbut Kelengkapannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alinbut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	3 Paket	3 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	75 Orang	75 Orang	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	<b>193.628.930</b>	<b>193.628.930</b>						<b>74</b>
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Paket	1Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	4 Paket	4 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	39.000.000	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	2 Paket	2 Paket	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	19.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	2 Dokumen	2 Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	10.638.930	10.638.930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	14.190.000	14.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	100.000.000	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Dokumen	1Dokumen	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	<b>581.322.200</b>	<b>581.322.200</b>						<b>4.10</b>
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Unit	3 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	350.000.000	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	68 Unit	68 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	4 Unit	4 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	31.322.200	31.322.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1Unit	1Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin		4		
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	10 Unit	10 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	<b>500.400.000</b>	<b>490.600.000</b>						<b>23</b>

2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	75.000.000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1 Laporan	1 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	10.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	12 Laporan	12 Laporan	85.006 Poin	85.006 Poin	440.400.000	430.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	150.000.000
2	13	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>				<b>390.000.000</b>
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	21 Unit	21 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	35.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	85.006 Poin	1 Unit	1 Unit	85.006 Poin	85.006 Poin	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	350.000.000
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>											<b>2.382.500.000</b>	<b>2.307.500.000</b>				<b>3.900.000.000</b>
2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>											<b>2.382.500.000</b>	<b>2.307.500.000</b>				<b>3.900.000.000</b>
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	32 Desa	32 Desa	100 %	100 %	150.000.000	113.078.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	250.000.000
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Wilayahnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	261 Desa	261 Desa	100 %	100 %	1.417.500.000	1.385.752.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	3.000.000.000
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Kewenangannya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	250 Desa	250 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	421 Desa	421 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	50.000.000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	15 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	815.000.000	808.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>											<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>				<b>750.000.000</b>
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>											<b>160.000.000</b>	<b>160.000.000</b>				<b>750.000.000</b>
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	2,78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	350.000.000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	2,78 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	400.000.000
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>											<b>25.902.276.000</b>	<b>25.512.926.000</b>				<b>10.212.276.000</b>
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>											<b>25.902.276.000</b>	<b>25.512.926.000</b>				<b>10.212.276.000</b>
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	365.000.000

2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	370.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	4771Orang	4771Orang	100 %	100 %	4.898.776.000	4.868.776.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	6.642.276.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	4.390.000.000	4.190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	1.000.000.000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Laporan	1Laporan	100 %	100 %	900.000.000	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	0
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Profil Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	150.000.000	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	265.000.000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	5.356.000.000	5.216.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	450.000.000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	15 Desa	15 Desa	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	107.500.000	107.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>											<b>4.170.000.000</b>	<b>5.227.130.500</b>				<b>7.671.700.000</b>
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>4.170.000.000</b>	<b>5.227.130.500</b>				<b>7.671.700.000</b>
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	500.000.000	920.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	100 %	2.300.000.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Lembaga	6 Lembaga	100 %	100 %	525.000.000	412.130.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	100 %	2.165.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	2.245.000.000	2.525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	100 %	950.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1Laporan	1Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatan nya diberdayakan	100 %	651.700.000

2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua	100 %	100 %	1Laporan	1Laporan	100 %	100 %	0	520.000.000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya	100 %	330.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1Dokumen	1Dokumen	100 %	100 %	900.000.000	850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	1.285.000.000

SUMBER : SIPD PENETAPAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN